



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

Ieke Sartika Iriany¹; Ade Purnawan²; Anggita Yulian Nugraha³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut
ieke_sartika@fisip.uniga.ac.id

ABSTRACT

The government issued a Family Planning Program (KB) aims to actualize the population grow balanced and quality family. The essence of national development is human development and the whole Indonesian society. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained from participant , places, documentation and archives and regulations that related to research. In this research data source was chosen purposively. The purpose of this research was to describe public participation consisting of interaction and communication that includes the interest, activeness and contibution of society an d to know the factors that encourage the occurrence of barriers internally and externally in the implementation of family planning program in Bungbulang subdistrict Garut The result of this research shows that public participation in the Family Planning program in Bungbulang subdistrict to actualize the population grow balanced and quality family in 2017 has not gone well as expected.this is because the interest, activeness and contibution of society has not been fully provided to the public. The obstacle factors are the societies did not participate in running KB program, lacking of society support and activeness of society. The society does not understand about the task and everything related to the existing program and does not following the development of informaation in DPPKBPPA in Bungbulang subdistrict.

Keywords: *Public Participation, Family Planning Program, National Development*

1 Pendahuluan

Laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan penduduk yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara.

Di Indonesia masalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata merupakan masalah tersendiri. Kondisi penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan menjadi beban pada suatu negara, seperti yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta yaitu No.4 terbesar di

dunia, tingkat TFR (*Total Fertility Rate*) atau jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan orang seorang perempuan (2,6) dengan pertumbuhan 1,49% per tahun yang diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai 400 juta jiwa (Pedoman Umum KB). Akibat adanya laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan yang dilakukan untuk menyikapi perkembangan pertumbuhan penduduk dengan mengeluarkan kebijakan yaitu UU RI No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, secara umum KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran, usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan.

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk di Indonesia naik 0.9% menjadi 258,7 juta jiwa dengan jumlah peserta KB sekitar 74.8% (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 2017). Pertumbuhan penduduk Kabupaten Garut tahun 2016 mencapai peringkat tertinggi se-Jawa Barat. Data tersebut diketahui melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Garut. Sedangkan di Kecamatan Bungbulang pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 meningkat sekitar 0.6%.

Pendidikan yang menjadi salah satu masalah yang juga terjadi di Kecamatan Bungbulang, dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai DPPKBPPPA pada hari Selasa, 28 Desember 2017 dapat diketahui bahwa taraf pendidikan di Kecamatan Bungbulang yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) kelas 1/ VII sehingga masyarakat belum sadar tentang pentingnya KB untuk kesejahteraan mereka. Kesadaran yang dimiliki masyarakat sangatlah rendah karena kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) itu sendiri sehingga masih banyak masyarakat yang belum sadar akan dampak yang akan terjadi apabila laju pertumbuhan terus meningkat.

Dalam hal ini diperlukannya partisipasi masyarakat agar program KB dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan menurut Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2011) menyatakan bahwa “partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program”.

Kepercayaan masyarakat atau pola pikir masyarakat terhadap program KB yang sebagian besar menjadi masalah bagi masyarakat yang tidak ingin berpartisipasi dalam program KB. Sebagian masyarakat atau sekelompok masyarakat masih mempercayai bahwa KB itu tidak diperbolehkan atau diharamkan. Mereka menolak keras secara terang-terangan dengan adanya program KB tersebut.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam program KB karena pelayanan KB dilakukan dengan sarana kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Peserta KB Jalur pelayanan swasta seluruh biaya ditanggung oleh akseptor. Sedangkan pada jalur pemerintah, beberapa daerah memberikan alat kontrasepsi gratis tetapi dengan biaya operasional ditanggung akseptor, namun hal ini pun jarang dilakukan. Bagi mereka yang mempunyai taraf ekonomi tinggi maka tak ada masalah untuk membeli alat kontrasepsi dipasaran. Tapi tidak begitu dengan mereka yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, mereka harus berpikir ulang dalam mengeluarkan uang untuk membeli alat kontrasepsi. Kondisi seperti ini berpengaruh dalam penggunaan jenis alat kontrasepsi dan cara KB yang ada bagi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah tidak mampu membeli alat-alat kontrasepsi yang ada dipasaran, sehingga ketidakmampuan seperti ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan penduduk yang tetap tinggi, dan akan mempengaruhi efektivitas serta partisipasi masyarakat dalam ber-KB.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data dan informasi tentang Partisipasi masyarakat dalam program KB yang meliputi interaksi dan komunikasi masyarakat di Kecamatan

Bungbulang dan Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Bungbulang.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Program KB di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut”.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung dan berinteraksi dengan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti meneliti masalah partisipasi masyarakat dalam program KB karena sebagian masyarakat di Kecamatan Bungbulang masih kurang memperhatikan dampak dari pertumbuhan penduduk. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program KB. Maka dari itu digunakan beberapa instrumen penelitian yang dapat mencapai indikator dan komponen, yaitu pedoman observasi dan pedoman wawancara (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini sumber data (informan) dipilih secara purposive. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi karena memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian oleh pewawancara” (Bugin, 2011).

Informan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu :

- a. Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kecamatan Bungbulang : 3 orang
- b. Bidan : 1 orang
- c. Pasangan usia subur (PUS)/Akseptor KB : 3 orang
- d. Masyarakat di Kecamatan Bungbulang : 3 orang

3 Hasil dan Implikasi

1) Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Program KB

Pelaksanaan program KB menggunakan pendekatan kemasyarakatan (*community approach*) yang berarti pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat (partisipasi masyarakat) dan juga pendekatan koordinasi aktif (*active coordinative approach*) artinya mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar.

Pada hakikatnya, untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mau ikut serta secara aktif berpartisipasi dalam program KB dan program pemerintah lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, fisik, maupun mental. Walaupun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan dalam proses pembangunan, namun pada praktiknya tidak selalu diupayakan sungguh-sungguh. Dari sisi lain, tumbuh dan kembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dari masyarakat dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam program KB tersebut.

Peneliti menggunakan bentuk partisipasi horizontal karena pada dasarnya program KB ini ditujukan untuk masyarakat yang mana satu masyarakat atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal atau berkaitan satu dengan yang lainnya.

Dari jenis partisipasi maka peneliti lebih setuju bahwa partisipasi masyarakat itu dilihat dari basis derajat kebebasan yaitu partisipasi sukarela karena partisipasi ini seseorang atau masyarakat yang ikut serta atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Peneliti mengemukakan bahwa partisipasi yang terjadi di Kecamatan Bungbulang masih pada tahap *Tokenism* yang artinya partisipasi hanya menjadi formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.

Alasan masyarakat ikut berpartisipasi pada program KB karena masyarakat percaya bahwa keikutsertaan masyarakat tersebut bukanlah ancaman bagi kehidupan mereka secara keseluruhan dan merasa bahwa program tersebut sangat penting.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya program KB, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat (tingkat ekonomi rendah) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan tersebut. Sedangkan pihak lainnya dalam banyak hal lebih terlihat tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa depan.

a. Interaksi

Interaksi lebih fokus kepada hubungan-hubungan antara orang-orang secara individual, antar kelompok orang, dan orang perorangan dengan kelompok. Interaksi yang terjalin baik akan membuat program KB berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Interaksi sosial asosiatif merupakan interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif dan mendukung individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi ke dalam empat bentuk, yaitu:

a) Kerjasama

Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.

Pihak DPPKBPPPA Kecamatan Bungbulang sudah bekerja secara maksimal untuk membuat program KB mencapai tujuannya. Terlaksananya program KB tersebut tentunya dibutuhkan kerjasama dengan pihak setempat, penanggungjawab program tingkat Kecamatan adalah camat, tingkat Desa adalah kepala desa, lalu untuk kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan KBnya bekerjasama atau konsultasi dengan Dinas Kesehatan apabila di tingkat Kecamatan adalah Puskesmas dan agar mendapat dukungan dari masyarakat maka DPPKBPPPA meminta bantuan dari para tokoh masyarakat juga. Tokoh masyarakat tersebut, dipertemukan dalam satu pertemuan dan memberikan penjelasan tentang program KB serta meminta kontribusi mereka agar masyarakat memperhatikan program KB tersebut.

Kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam program KB ini peranan tokoh informal dan tokoh masyarakat sangat penting terutama dalam hal mempengaruhi, memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program.

b) Akomodasi

Akomodasi adalah suatu proses atau cara untuk penyelesaian pertentangan tanpa saling menjatuhkan satu sama lain dan meredakan pertentangan tersebut untuk mencapai kesetabilan. Akomodasi yang dilakukan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Garut sudah berusaha secara baik, namun kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri karena untuk mendapat partisipasi langsung dari masyarakat itu harus tanpa paksaan.

c) **Asimilasi**

Dengan adanya asimilasi, para pihak lebih saling mengenal dan timbul benih-benih toleransi dengan mudah untuk saling mendekati dan saling mengingatkan. Asimilasi ini adalah taraf lanjut dari akomodasi dengan ditandai adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok dengan memerhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

Interaksi disosiatif memiliki sifat yang berkebalikan dengan interaksi asosiatif, yang mana interaksi disosiatif lebih bersifat negatif. Interaksi disosiatif dilakukan sebagai pertentangan akan kepentingan dan tujuan individu lain atau kelompok.

a) **Persaingan**

Persaingan yang merupakan suatu proses dimana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu saat akan menjadi pusat perhatian masyarakat.

b) **Kontravensi**

Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang timbul karena adanya pertentangan atau pertikaian. Yang melakukan kontravensi di Kecamatan Bungbulang itu hanya sebagian orang atau kelompok saja.

b. **Komunikasi**

Komunikasi memegang peran penting dalam kehidupan sosial namun ibarat mata uang, komunikasi memiliki dua sisi yang berbeda. Disatu sisi komunikasi merupakan proses sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan disisi lain, komunikasi dapat mengancam kehidupan masyarakat atau keberlangsungan program KB itu sendiri.

2) **Faktor Penghambat dalam Program KB di Kecamatan Bungbulang**

Pada pelaksanaan program KB di Kecamatan Bungbulang tentu saja masih mengalami beberapa masalah dan oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan program KB di Kecamatan Bungbulang tersebut.

a. **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat belum paham tentang program KB secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat dalam program KB ini memiliki dua pelayanan, yaitu pelayanan pemerintah dan pelayanan swasta. Pelayanan pemerintah adalah pelayanan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintahan, berarti masyarakat ikut program KB karena paksaan atau karena tuntutan dari pemerintah itu sendiri. Berbeda halnya dengan pelayanan swasta, masyarakat dengan sukarela atau tanpa paksaan ikut program KB. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan khususnya pelayanan pemerintah tidak paham apa manfaat yang lebih spesifik bagi kesejahteraan mereka, yang mereka lakukan hanya untuk memenuhi keinginan masyarakat saja.

b. **Pemilihan Alat Kontrasepsi Yang Lebih Mudah Dan Murah**

Masyarakat lebih banyak memilih alat kontrasepsi yang lebih mudah dan murah seperti pil dan suntik. Hal ini dipengaruhi oleh :

- Pendapatan diperoleh karena seseorang melakukan pekerjaan. Pendapatan biasanya dipandang sebagai hal penting dalam keikutsertaan pada kegiatan publik khususnya program KB. Namun hal ini dikembalikan pula pada pemahaman masyarakat itu sendiri.
- Kesehatan, masyarakat juga kadang tidak bisa memilih alat kontrasepsi mana yang bisa digunakan.

c. Perbedaan Pendapat Atau Pola Pikir Masyarakat

Perbedaan pendapat yang menjadi penghambat terlaksananya program KB, seringkali kepercayaan atau pola pikir yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada pada program KB. Padahal program KB ini dibentuk dari beberapa fenomena atau permasalahan yang ada pada masyarakat sehingga program pemerintah ini dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat tanpa ada pertentangan dan kontroversi.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam program KB di Kecamatan Bungbulang masih kurang dan belum terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan analisa peneliti dan hasil wawancara dengan informan yang ada di Kecamatan Bungbulang pada program KB tahun 2017, belum berjalan baik seperti apa yang diharapkan. Maka berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Partisipasi program KB di Kecamatan Bungbulang yang terdiri dari interaksi dan komunikasi yang meliputi minat masyarakat, keaktifan masyarakat, dan kontribusi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala di dalam partisipasi masyarakat (kontribusi masyarakat). Yaitu hanya sedikit masyarakat yang ikut berkontribusi secara langsung, mengingat banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya program KB bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Faktor penghambat program KB di Kecamatan Bungbulang dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas adalah sebagai berikut :
 - a) Sebagian masyarakat masih banyak yang belum paham program KB secara menyeluruh.
 - b) Banyaknya masyarakat memilih alat kontrasepsi yang murah dengan metode jangka pendek.

Perbedaan pola pikir atau kepercayaan pada suatu kelompok di masyarakat merupakan hambatan bagi pihak DPPKBPPPA Kecamatan Bungbulang untuk mencapai target yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2008). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, G. G., Kania, I., Ulumudin, A., & Ramdhani, A. (2019). Coordination Poverty Alleviation Program, An Analysis Based On Instrumental and Institutional Perspective. *2nd International Seminar Series On Regional Dynamic (ISSRD)* (hal. 75-87). Jember: UNEJ e-Proceeding.
- Badrudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bugin, B. (2011). *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Damsar, & Indrayani, P. (2016). *Penagntar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana.
- Dwiningrum, S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdani, N. A., & Ramdhani, A. (2019). *Teori Organisasi* . Bandung: Karima.
- Islamy, I. (2007). *Prinsip-Perinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusak Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mardiko, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan Publik)*. Bandung: Alfabeta.
- Rohman, A. (2009). *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang: Avorroes Press.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS Press.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan : Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi dan Sistem Kepemimpinan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Taufiqurakhman, B. (2014). *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Pers.
- Wibawa, S. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Erlangga.

